

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. H. (2020). Pemanfaatan Teknologi GNSS Untuk Survei dan Pemetaan Pertanahan. Bandung : Institut Teknologi Bandung.
- Imam, M. (2014). *Pengukuran GPS Geodetik dan Terrestrial(TSL) Untuk Pembangunan Rel Kereta Api Baru di Menteng Jaya Jakarta*. (Skripsi Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Jihan, C. J. (2015). Pemanfaatan Global Navigation Satellite System (GNSS) Untuk Pemetaan Penggunaan Lahan di Kecamatan Sukolilo Surabaya Timur. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Julianto, N. E., Safrel, I., Taveriyanto, A. (2018). *High Accuracy Geodetic Control Point Measurement Using GPS Geodetic With Static Method*. *Journal Teknik Sipil & Perencanaan*, 20 (2), 81 – 89.
- Kementrian ATR/BPN. (2022). *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Nomor 1/Juknis – 100.HK.02.01/1/2022.
- Marbawi, M., Yuwono, D. B., Sudarsono, B. (2015). Analisis Pengukuran Bidang Tanah Menggunakan GNSS RTK-Radio Dan RTK-NTRIP Pada Stasiun CORS Undip. *Journal Undip* 4 (4) ISSN: 2337-825X.
- Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengukuran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraris dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2 tentang Pengukuran Tanah Sistematis Lengkap
- Pratama, A. Syaifullah, A. (2020). Teknik-Teknik Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Pada Program PTSL di Kantah Lombok Timur. *Jurnal Tunas Agraria* 3 (2), 76 – 85, 2020.
- Ramadhony, A. B., Awaluddin, M., & Sasmito, B. (2017). Analisis Pengukuran Bidang Tanah Dengan Menggunakan GPS Pemetaan. *Jurnal Undip*, 6 (4), 305 – 315.
- Saena, G. H. (2018). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017. Universitas Islam Indonesia.
- Sukiyati. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di BPN Kota Yogyakarta. *Jurnal Widya Prananta Hukum*, 1 (2).